

Majalah Digital Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur



# ASPIRASI **kita**



Satu Fraksi Utuh,  
FPKS Jatim Siap Perjuangkan  
Aspirasi Rakyat:

# PINTU KAMI TERBUKA

Edisi 1 - Desember 2024



[www.fraksipksjatim.id](http://www.fraksipksjatim.id)



[fraksipksjatim](https://www.facebook.com/fraksipksjatim)

# Satu Fraksi Utuh, FPKS Jatim Siap Perjuangkan Aspirasi Rakyat: PINTU KAMI TERBUKA

Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur makin siap memperjuangkan berbagai aspirasi Jawa Timur. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati.



Karenanya untuk rakyat Jawa Timur, kami membuka program "Hari Aspirasi" setiap senin pekan pertama, dalam setiap bulannya. Siapapun monggo bisa menyampaikan aspirasinya, pintu kami terbuka,"

Lilik menyebut, dengan terbentuk utuh satu fraksi, pelayanan kepada masyarakat akan makin optimal. Hal itu, karena semua putusan dan langkah akan semakin mudah dikoordinasi.

"Periode sebelumnya, kami fraksi gabungan dengan dua partai lain. Alhamdulillah, periode ini utuh satu fraksi. Siap tancap gas," tegas Lilik.

Di periode 2024-2029, Fraksi PKS di DPRD Provinsi Jawa Timur memang utuh satu fraksi dengan 5 anggota legeslatif. Sehingga, bisa memenuhi semua komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur.

Di Komisi A yang terkait dengan pemerintahan, ada Agus Cahyono, anggota DPRD dari Dapil 9 yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Ngawi.

Sementara di Komisi B tentang perekonomian, ada Khusnul Khuluk dari Dapil 5 yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Jember.

Di Komisi C bidang keuangan, ada Lilik Hendarwati dari Dapil 1 Surabaya. Lalu di Komisi D bidang pembangunan ada Harisandi Savari dari Dapil 14 yang meliputi semua kabupaten di Pulau Madura.

Kemudian di Komisi E bidang kesejahteraan rakyat, ada Puguh Wiji Pamungkas dari Dapil 6 yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Dengan lengkapnya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari PKS yang mengisi seluruh komisi di DPRD Jatim, Lilik optimis bisa lebih banyak membantu masyarakat Jawa Timur.

"Karenanya untuk rakyat Jawa Timur, kami membuka program "Hari Aspirasi" setiap senin pekan pertama, dalam setiap bulannya. Siapapun monggo bisa menyampaikan aspirasinya, pintu kami terbuka," pungkas Lilik. }

# HARI ASPIRASI, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Buka Lebar Tampung Aspirasi Rakyat



**F**raksi PKS di DPRD Jawa Timur punya terobosan menarik. Untuk menampung aspirasi rakyat Jawa Timur, Fraksi PKS Jatim membuka "Hari Aspirasi". Siapapun boleh hadir menyampaikan aspirasinya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati mengatakan sebenarnya hari aspirasi bukan hal baru bagi internal Fraksi PKS. Di periode sebelumnya memang sudah ada, namun sifatnya personal anggota legeslatifnya.

"Nah dalam periode ini, kami menjadikannya menjadi program fraksi, yang kami buka setiap Senin awal bulan. Jadi ini sudah kegiatan rutin dari kami sebagai wakil rakyat," jelasnya.

Sebelum diformalkannya program ini, menurut Lilik, Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur ini memang sudah banyak dikunjungi masyarakat yang mengeluhkan berbagai hal.

Agar lebih tertata dan optimal, program hari Fraksi diformalkan.

Lilik menyampaikan, di Hari Aspirasi, kelompok masyarakat yang hadir bisa ditemui oleh seluruh anggota Fraksi PKS Jatim. Kelompok masyarakat yang hadir bisa memilih akan menemui siapa. Biasanya tergantung dengan aspirasi yang akan disampaikan terkait dengan komisi yang ada di DPRD Jawa Timur.

"Alhamdulillah, di periode ini, kami satu fraksi utuh. Semua anggota Fraksi PKS Jatim menempati semua komisi di DPRD Jatim," katanya.

Selain komisi, kelompok masyarakat bisa menemui anggota DPRD dari Fraksi PKS yang berasal dari dapil yang sama dengan tempat aspirasinya.

Di Komisi A yang terkait dengan pemerintahan, ada Agus Cahyono, anggota DPRD dari Dapil 9 yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Ngawi.

Sementara di Komisi B tentang perekonomian, ada Khusnul Khuluk dari Dapil 5 yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Jember.

Di Komisi C bidang keuangan, ada Lilik Hendarwati dari Dapil 1 Surabaya. Lalu di Komisi D bidang pembangunan ada Harisandi Savari dari Dapil 14 yang meliputi semua kabupaten di Pulau Madura.

Kemudian di Komisi E bidang kesejahteraan rakyat, ada Puguh Wiji Pamungkas dari Dapil 6 yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

"Nah, siapapun jika njenengan punya aspirasi, monggo disampaikan ke kami. Silakan dipilih akan menemui siapa, pintu kami selalu terbuka," tegas Lilik.

Menurut dia, seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur memiliki semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun tidak turun ke warga.

"Diruangan Fraksi PKS DPRD Jawa Timur memberikan peluang masyarakat untuk hadir menyampaikan keluhannya langsung ke anggota DPRD Jawa Timur," jelasnya.

Lilik mengatakan untuk hari aspirasi pihaknya mewajibkan anggota Fraksi PKS Jawa Timur untuk secara bergilir untuk piket anggota untuk menerima aspirasi warga tersebut.

Ditambahkan olehnya, dalam pelaksanaan hari aspirasi tersebut, pihaknya tidak membatasi jenis aspirasi yang masuk.

"Semua akan kami tindaklanjuti dan koordinasikan dengan komisi Dewan dan OPD terkait. Baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Bahkan jika perlu juga akan kami koordinasikan dengan DPR RI dan pemerintah pusat. Bergantung jenis persoalannya," tandasnya.}



## 120 Anggota DPRD Jawa Timur

**Tandatangani  
Komitmen  
Bersama  
Anti Korupsi,  
Fraksi PKS  
Jatim Beri  
Acungan  
Jempol  
untuk KPK**

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Anti Korupsi Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (16/10) diapresiasi Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur.

Sebanyak 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memang diminta menandatangani komitmen bersama anti korupsi di Ruang Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.

Setelah mengisi daftar hadir, setiap anggota legeslatif diminta langsung maju ke podium untuk melakukan penandatanganan, lalu kembali duduk di tempat yang disediakan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati menyampaikan apresiasinya atas upaya untuk menghindarkan setiap anggota DPRD Provinsi agar terhindar dari tindakan korupsi. Menurutnya, ini perlu untuk setiap pejabat publik.

Ia bahkan berharap, kegiatan ini tidak hanya simbolis, namun benar-benar menguatkan komitmen anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan praktik-praktik korupsi.

"Saya acungi jempol, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan satu komitmen yang tidak hanya secara simbolis tetapi menjadi bagian dari niat baik awal yang sudah tertata untuk kemudian terhindar dari kasus-kasus

Kita butuh sebuah pernyataan sikap dalam sebuah komitmen. Menurut saya, ini akan selalu mengingatkan kami di dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan

korupsi di periode ini," kata Lilik.

Baginya, penandatanganan komitmen anti korupsi ini sangat penting, karena merupakan pernyataan sikap masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

"Kita butuh sebuah pernyataan sikap dalam sebuah komitmen. Menurut saya, ini akan selalu mengingatkan kami di dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan," ujar Lilik.

Puguh Wiji Pamungkas, Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Jatim senada.

Menurutnya, penandatanganan anti korupsi yang dilakukan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu wujud dari komitmen bersama untuk mewujudkan clean government.

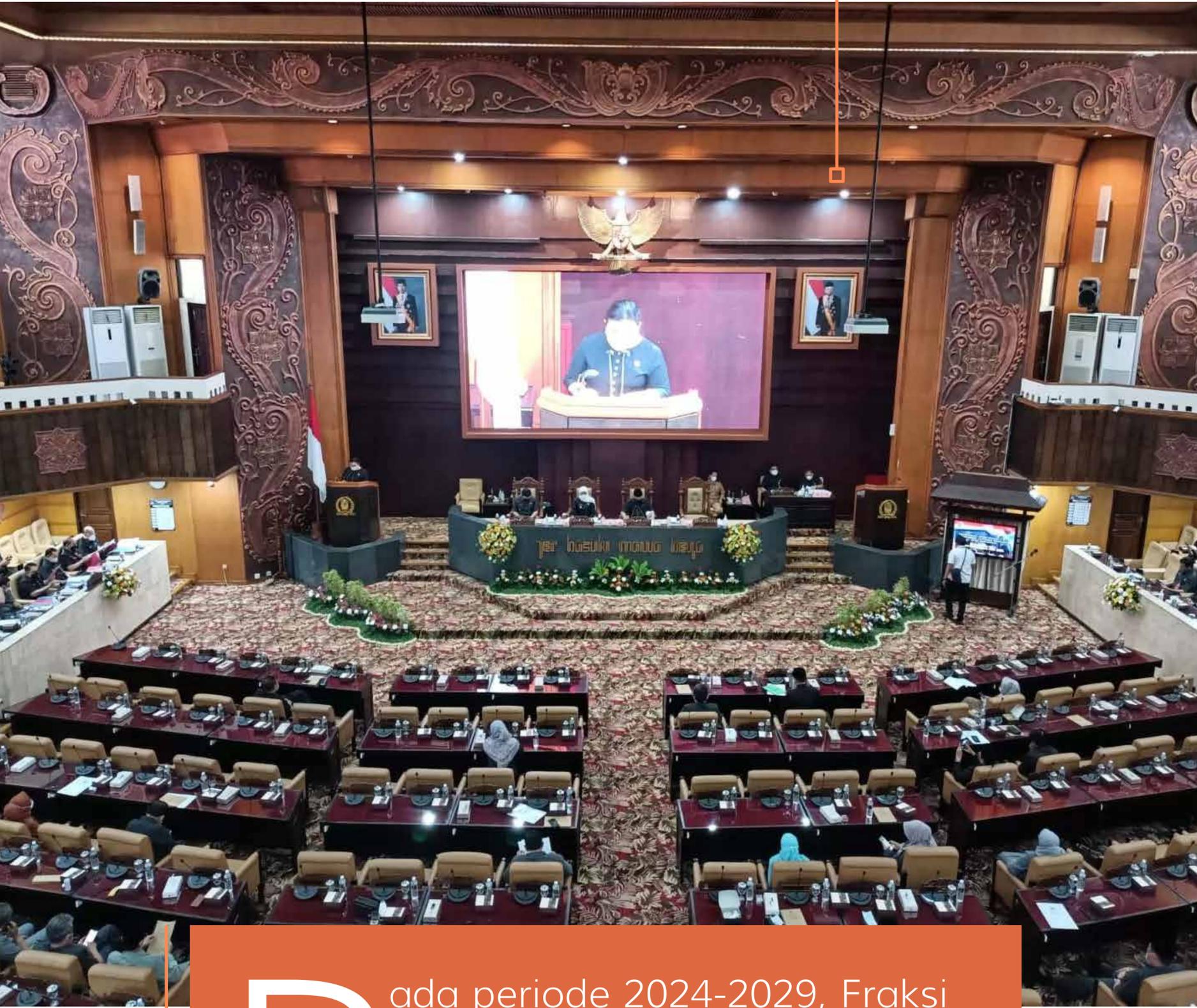
"Ini dalam rangka agar kami para anggota legislatif bisa terus menjunjung tinggi integritas, menjunjung tinggi dedikasi, menjunjung tinggi sportivitas untuk kemudian menjalankan peran kita sebagai penyelenggara negara," katanya.

Puguh kemudian menyampaikan terima kasihnya kepada KPK yang sudah menginisiasi kegiatan ini karena akan menjadi pengingat setiap anggota DPRD Jawa Timur.

"Ini juga akan menjadi koridor bagi kita semuanya untuk tetap mengedepankan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan tatanan bernegara," kata pria kelahiran 1984 ini.

Ia berharap, kegiatan penandatanganan komitmen bersama anti korupsi untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wujud dari komitmen bersama untuk menghindari dan memerangi korupsi.}}

# Komposisi SUSUNAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Fraksi PKS DPRD Jatim



**P**ada periode 2024-2029, Fraksi PKS di DPRD Provinsi Jawa Timur lengkap satu fraksi. Lima anggota legeslatif terpilih memenuhi semua komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Berikut komposisi susunan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi PKS Jatim beserta mitrakerjanya..

## KOMISI A (pemerintahan)



H. AGUS  
CAHYONO,  
SHI, MHI

Komisi A membidangi pemerintahan. Bertugas secara khusus pada masalah pemerintahan daerah. Bidang ini meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, kependudukan, penerangan dan pers, hukum perundangan dan hak asasi manusia, kepegawaian, aparatur, perijinan, partai politik dan organisasi kemasyarakatan, pertanahan, wilayah kelautan, daerah, telematika, kerjasamadan penyelesaian perselisihan, kepolisian pamong praja, pendidikan dan pelatihan aparatur negara serta perlindungan konsumen dan pemberdayaan masyarakat.

Anggota Fraksi yang bertugas di Komisi A adalah Agus Cahyono yang berasal dari dapil 9 (Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Ngawi). Di Komisi A, Agus Cah terpilih sebagai wakil ketua. Selain di Komisi A, Agus Cah juga bertugas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Timur.

### Mitra kerja komisi A yaitu:

- Bakesbangpol Prov. Jawa Timur
- Satpol PP Prov. Jawa Timur
- Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Timur.
- Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Timur
- Badan Pengembangan SDM Prov. Jawa Timur.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jawa Timur.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jawa Timur.
- Biro Organisasi Setdaprov Jatim.
- Biro Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim.
- Biro Hukum Setdaprov Jatim.
- Inspektorat Prov. Jawa Timur.
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Jatim.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jatim.
- Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim.
- Sekretariat Korpri Jatim.

## KOMISI B (Perekonomian)



DRS. H. M.  
**KHUSNUL  
KHULUK**

**K**omisi B DPRD Prov. Jawa Timur ini membidangi urusan perekonomian. Bidang tugasnya meliputi perekonomian, perbankan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, pengadaan pangan dan logistik, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pengelolaan potensi laut daerah.

Anggota Fraksi PKS Jatim yang bertugas di Komisi B adalah Khusnul Khuluk, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari dapil 5 (Kabupaten Lumajang dan Jember). Selain di Komisi B, Khusnul Khuluk juga bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur.

### **Mitra kerja** komisi B yaitu:

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur.
- Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Timur.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur.
- Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur.
- Dinas Perkebunan Prov. Jawa Timur.
- Dinas Penanaman Modal PTSP Prov. Jawa Timur.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jawa Timur.
- Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur.
- Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur.
- Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov. Jawa Timur.

# KOMISI C (Keuangan)



HJ. LILIK  
HENDARWATI

**K**omisi C membidangi masalah strategis dalam perencanaan pembangunan di Jawa Timur. Komisi ini membidangi masalah keuangan, termasuk di dalamnya keuangan dan perbankan, perpajakan dan retribusi, pemegang kas daerah/perusahaan daerah, perusahaan patungan, badan usaha, penanaman modal dan sertapengawasan keuangan dan pembangunan daerah.

Komisi C DPRD Jawa Timur melakukan fungsi anggaran, legeslasi dan pengawasan dalam bidang keuangan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang bertugas di Komisi C DPRD Jatim yaitu Lilik Hendarwati. Selain ditunjuk sebagai sebagai Ketua Fraksi PKS Jatim, Anggota DPRD Jatim dari dapil 1 Surabaya ini juga mendapatkan amanah di badan anggaran (banggar) dan Badan Musyawarah (Bamus).

## Mitra kerja komisi C yaitu:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jawa Timur.
- Badan Pendapatan Daerah Prov. Jawa Timur.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Bank Jatim dan BPR UMKM Jawa Timur.
- PT Jamkrida.
- BUMD-BUMD Prov. Jawa Timur.
- Badan usaha patungan antara BUMD Jatim dengan swasta (KBPU)

## KOMISI D (Pembangunan)



**ARISANDI  
SAVARI**  
S.PT, ST

**K**omisi D DPRD Jawa Timur bertugas mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Komisi ini mendapatkan tugas mengurus bidang pembangunan yang meliputi pekerjaan umum (kebinamargaan, pengairan, tata ruang, dan pemukiman), perencanaan dan pengendalian, pembangunan regional, pengelolaan pelabuhan laut dan udara regional, perhubungan dan telekomunikasi, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, penelitian dan pengembangan daerah, pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS yang bertugas di Komisi D adalah Harisandi Savari. Harisandi terpilih menjadi anggota DPRD Jatim dari dapil 14 yang mencakup semua kabupaten di Pulau Madura. Selain di Komisi D, Harisandi juga bertugas di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jawa Timur.

### **Mitra kerja** komisi D yaitu:

- Bappeda
- DPU Bina Marga
- DPU Cipta Karya
- DPU Sumber daya Air
- Dinas Perhubungan
- Dinas Lingkungan hidup
- Dinas ESDM
- Biro Administrasi pembangunan
- Biro Pengadaan Barang dan jasa

# KOMISI E (Kesejahteraan Rakyat)



DRH. H.  
**PUGUH WIJI  
PAMUNGKAS**  
,MM

**K**omisi E DPRD Jawa Timur berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Komisi ini membidangi sektor ketanagerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda dan olah raga, agama, sosial, kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana, pengembangan penanan perempuan, transmigrasi, penanganan bencana, arsip dan perpustakaan.

Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur yang bertugas di Komisi E adalah Puguh Wiji Pamungkas. Anggota DPRD Jatim yang terpilih dari dapil 6 (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu) ini juga bertugas di Badan Kehormatan (BK) DPRD Jawa Timur.

## Mitra kerja komisi E yaitu:

- Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur.
- Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur.
- Dinas Sosial Prov. Jawa Timur.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur.
- RSUD dr Soetomo.
- RSU Haji Surabaya.
- RS Saiful Anwar Malang.
- RSUD dr Soedono Madiun.
- RSUD Soebandi Jember.
- Biro Kessos Setdaprov Jatim.
- RS Jiwa Menur Surabaya.
- RS Jiwa lawang Malang.
- RS Mata Masyarakat Surabaya.
- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Jatim.
- KONI Jawa Timur.
- Kwarda Pramuka Jawa Timut.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Jatim.
- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Jatim.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Kependudukan Jatim.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jatim.}}



# Lilik Hendarwati

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 1 (Surabaya), Komisi C (keuangan), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jawa Timur.

Lahir di Jakarta, 11 September 1972. Menikah, dengan 6 orang anak.

## PENDIDIKAN

- SDN BANGUNSARI ii DOLOPO MADIUN
- SMPN I DOLOPO MADIUN
- SMAN I GEGER MADIUN
- FISIKA FMIPA ITS
- DIPLOMA CHILD PSYCHOLOGY HARCOURT EDUCATION, MONTREAL CANADA
- DIPLOMA MANAGEMENT DAY CARE, ICS, MONTREAL CANADA SEKRETRIS

## AKTIVITAS

- Full timer mother
- Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim periode 2024-2029
- Konsultan Keluarga Like (Lingkar Keluarga)
- Pembina Koperasi UMKM Koperasi Sejahtera Bersama
- Pembina Laksita Semesta Akademi
- Pembina Paguyuban Warga Sejahtera
- Pembina Komunitas Pengemudi Daring Speed Korda Surabaya

[www.lilikhendarwati.id](http://www.lilikhendarwati.id)

[LILIKHENDARWATI](#)

[LILIKHENDARWATI.SBY](#)

# Ketua Fraksi PKS Jatim Lilik Hendarwati Protes Kenaikan PPN di 2025: Jika Dipaksakan, Ekonomi Rakyat Makin Melemah



**K**etua Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati menyayangkan kebijakan Pemerintah Indonesia yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan diberlakukan Januari 2025 tahun depan.

Menurut Lilik, kebijakan menaikkan PPN ini tidak tepat, karena kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Hal ini, menurutnya jika dipaksakan, akan membuat ekonomi rakyat makin melemah.

“ Saya kira kenaikan menjadi 12% di tengah kondisi ekonomi yang masih tertekan ini, akan memperburuk daya beli masyarakat, terutama tentu bagi kelompok menengah ke bawah,”

Dalam situasi perekonomian yang tidak menentu ini, ia menyampaikan masih sering melihat banyak keluarga yang kesulitan di dalam mencukupi kebutuhan dasar.

“Saat di reses itu, saya menemukan masih ada masyarakat kesulitan, bahkan masih belum tentu punya beras di hari itu. Ini kan miris,” kata Lilik.

Lilik menilai, jika kenaikan PPN itu tetap diberlakukan, akan semakin menghimpit rakyat, karena berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, tak terkecuali harga barang kebutuhan pokok yang juga berpotensi naik. Kenaikan harga barang jasa ini juga akan berpotensi menimbulkan inflasi.

“Saya kira kenaikan menjadi 12% di tengah kondisi ekonomi yang masih tertekan ini, akan memperburuk daya beli masyarakat, terutama tentu bagi kelompok menengah ke bawah,” katanya.

Karenanya, jika kemudian ada kebijakan kenaikan PPN, menurutnya justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat dan kemudian akan memperuncing kesenjangan sosial dan ekonomi.

Peningkatan PPN ini, imbuhnya, akan berpotensi memberikan dampak yang tidak merata. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah akan merasakan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang berpenghasilan tinggi. Gap yang tercipta akan semakin tinggi.

Dengan pendapatan masyarakat yang kecil ditambah dengan kewajiban terhadap pajak yang semakin naik persentasenya, menurut Lilik akan sangat memberatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Poin yang ketiga mungkin kaitan dengan harapan terhadap pemerintah untuk bijak dan mempertimbangkan kembali keputusan untuk menaikkan PPN menjadi 12%

Karena kita melihat bahwa sekarang ini dalam posisi ketidakpastian ekonomi di masyarakat, tingginya tingkat pengangguran dan kemudian pasti yang terjadi adalah inflasi domestik itu jelas.

Dengan terbentuknya pemerintahan yang baru, kami berharap bukan malah memperburuk ekonomi masyarakat, tetapi tentu sebaliknya, pemerintah bisa mencari alternatif solusi yang lain yang sekiranya tidak membebani masyarakat.

Ada baiknya pemerintah juga memulai mempertimbangkan kembali bantuan sosial atau subsidi kepada masyarakat ekonomi masyarakat kita, dan tentu berharap pemerintah ke depan ini semakin sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terkait dengan daya beli masyarakat makin menurun.

Saya sampaikan atau sebagai wakil rakyat, hal yang terdepan yang selalu ingin saya sampaikan kepada eksekutif kepada pemerintah ini adalah agar kebijakan-kebijakan yang diambil seharusnya memberikan dampak baik kepada masyarakat terutama kaitan dengan perekonomian mereka yang sudah berat sekarang ini.

Lilik meminta kepada Pemerintah RI agar mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan PPN yang akan diberlakukan tahun depan.

“Harus betul-betul dipertimbangkan dengan sangat matang, jangan sampai kemudian semakin memberatkan kehidupan masyarakat, hanya untuk, misalnya memberikan tambahan untuk PNS atau meningkatkan infrastruktur. Kasihan rakyat,” tegas Lilik.

Selain itu, Lilik mensinyalir kenaikan PPN juga akan membebani pelaku UMKM, padahal UMKM sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) yang terbesar.

Untuk menambah pendapatan negara, menurut Lilik, masih banyak alternatif yang bisa dipilih, misalnya efisiensi APBN, prioritas penganggaran, kebocoran anggaran yang perlu dicermati, atau dengan pengoptimalan kinerja BUMN.

“Kalau mau narik pajak utamakan yang dari masyarakat berpenghasilan tinggi, misal dari pajak pendapatan yang dikenakan pada tingkatan gaji kesekian atau pajak barang-barang mewah,” pungkasnya.}



## Ketua Fraksi PKS Jatim Minta Pemprov Optimalisasi Aset Jawa Timur untuk Tingkatkan PAD

Lilik Hendarwati, Ketua Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur yang juga anggota Badan Anggaran meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Lilik usai mengikuti studi banding Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur ke DPRD DKI Jakarta pada 30 Oktober hingga 2 November 2024 lalu.

Dalam kesempatan itu, Lilik menjelaskan, mendapatkan penjelasan dari Lukmanul Hakim, salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang juga anggota Banggar DPRD DKI Jakarta.

Menurut Lilik, PAD Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan. Ini didapat dari sektor reklame, optimalisasi aset dan PBB.

Lilik menyampaikan bahwa mulai Januari 2025, sesuai dengan undang-undang Hak Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD) I tahun 2022, akan ada pengurangan PAD Jawa Timur sebesar 5.965.980.955,113 yang mengahsruskan Jawa Timur bekerja keras mencari alternatif PAD baru.

“Tentu harapan Banggar Jawa Timur, PAD Provinsi Jatim bisa terus ditingkatkan dengan optimalisasi aset sebagaimana di Jakarta,” ujar wanita yang sudah dua periode ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim ini.

Lilik juga berharap, pengelolaan BUMD Provinsi Jawa Timur bisa terus meningkat devidennya lebih dari yang lalu. Atau mengoptimalkan BUMD yang ada dengan kerja-kerja yang saling terkait untuk menunjang kesejahteraan Jawa Timur.

“Kaitannya dengan aset juga seperti itu tentu kami mengharapkan bahwa aset Jawa Timur yang masih luar biasa banyak yang masih belum teroptimalkan. Maka perlukiranyapada periode ini untuk menambah pendapatan asli daerah kita,” ujarnya.

Karenanya, ia menyarankan agar aset-aset yang dimiliki Jawa Timur harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Khususnya aset-aset yang terbengkalai yang belum jelas dinas pemangkunya.

BUMD di Jakarta, Lilik melanjutkan, tidak di bawah biro ekonomi, tetapi dimiliki Badan Pembina BUMD yang secara langsung mendampingi BUMD di Jakarta. Dengan model seperti ini, ia menilai pengelolaan BUMD akan lebih optimal untuk meningkatkan PAD di Jakarta.

Menurutnya, hal ini tentu menginspirasi bagi keberadaan BUMD yang ada di Jawa Timur. Bila memungkinkan perlu untuk diposisikan yang sama sehingga ada satu badan Pembina khusus BUMD yang akan fokus untuk memastikan bahwa setiap BUMD yang ada di Jawa Timur betul-betul memberikan nilai dividen yang optimal bagi pendapatan asli daerah.

“Tidak sekedar mendapatkan dana kemudian tidak optimal di dalam pelaksanaan bisnisnya. Tentu Banggar bersama dengan komisi DPRD Provinsi Jawa Timur punya kewajibannya untuk terus memastikan agar optimalisasi aset ini bisa betul-betul terlaksana,” pungkasnya. }

Tentu harapan Banggar Jawa Timur, PAD Provinsi Jatim bisa terus ditingkatkan dengan optimalisasi aset sebagaimana di Jakarta,”



# PUGUH Wiji Pamungkas

Sekretaris Fraksi PKS Jatim, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 6 yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Lahir di Malang, 30 Oktober 1984, menikah dengan 3 anak

## PENDIDIKAN

- SDN 3 Sukoanyar Wajak
- SMPN 1 Wajak
- SMAN 1 Gondanglegi
- S1 Kedokteran Hewan Universitas Udayana Bali
- S2 Magister Manajemen SDMSTIEMalangKucecwara
- S3 Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang (proses belajar)

## AKTIVITAS

- Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim 2024-2029
- Founder dan owner RSU Wajak Husada- Malang
- Founder dan owner Jaringan Klinik Pratama Amirudin (Azzam Berkah Medika)
- Founder dan owner Jaringan Apotek Wajak Group
- Founder dan owner RP Media Group

 [www.puguhpamungkas.com](http://www.puguhpamungkas.com)

 Puguh Arema (Puguh Pamungkas)

   Puguh Pamungkas

 Puguh Wiji Pamungkas

**Pancaroba,  
Puguh  
Pamungkas  
Dorong  
Kadinkes  
Jatim  
Siapkan  
Langkah  
Preventif  
Cegah  
Berbagai  
Penyakit**



**M**emasuki musim hujan, berbagai kerawanan biasanya akan muncul, khususnya terkait dengan kesehatan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS Puguh Wiji Pamungkas meminta Dinas Kesehatan Jawa Timur waspada.

Menurut Puguh, salah satu titik kerawanan di masa Pancaroba ini, adalah munculnya berbagai macam penyakit, terutama beberapa penyakit yang peaknya pada saat musim penghujan, seperti demam berdarah, influenza, diare dan sebagainya.

“Saya mendorong kepada Kepala Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan di Jawa Timur dan sampai di seluruh apa instrumen sampai di level kecamatan di Puskesmas-puskesmas untuk meningkatkan preventif medicine, pencegahan terhadap potensi munculnya berbagai macam penyakit yang ditimbulkan karena peralihan musim dari kemarau ke musim hujan ini,” tegas pria yang saat ini bertugas di Komisi E DPRD Jawa Timur ini.

Menurutnya, saat ini ada 967 puskesmas di Jawa Timur. Jika puskesmas bisa bekerja secara efektif untuk melakukan preventif medicine berupa promosi kesehatan terkait dengan pola hidup bersih dan sehat dalam menyambut cuaca musim penghujan, Puguh yakin akan bisa memperkecil potensi terjadinya demam berdarah.

Pria kelahiran 1984 ini menyampaikan, jika secara masif puskesmas-puskesmas ini melakukan edukasi secara komprehensif kepada masyarakat lewat kader-kader kesehatan yang ada di desa, berbagai macam penyakit yang ditimbulkan karena musim hujan itu bisa berkurang.

“Kita bisa bekerjasama dengan tokoh masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada di masyarakat sampai lapisan terkecil sehingga masyarakat ini memahami secara utuh, baik tentang pola hidup bersih dan sehat,” pesannya. {}

**Minat Baca Rendah, Puguh Wiji Pamungkas DPRD Jatim Dorong Perpustakaan Di Jatim Lakukan Transformasi**

**R**adarmalang- Surabaya - Membaca adalah salah satu ukuran sederhana untuk melihat sebuah wilayah atau daerah masuk dalam kategori maju atau tidak.

Minat baca masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kemajuan sebuah daerah.

Tingkat literasi di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain.

Berdasarkan data dari UNESCO, tingkat literasi di Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 76 negara yang disurvei pada tahun 2020.

Ditahun2023,Nilaiindekstingkatkegemaran membaca (TGM) masyarakat Indonesia adalah 66,77 poin.

Sebagai informasi, indikator perilaku membaca yang dipertimbangkan dalam penilaian tingkat kegemaran membaca (TGM) adalah sebagai berikut:



- Frekuensi membaca
- Durasi membaca
- Banyaknya buku yang dibaca
- Frekuensi mengakses internet
- Durasi mengakses internet

Berikut ini adalah provinsi yang penduduknya paling gemar membaca diukur dari indikator TGM:

- Yogyakarta: 73,27
- Jawa Tengah: 71,31
- Jawa Barat: 70,47
- Jakarta: 69,94
- Jawa Timur: 69,78
- Kalimantan Utara: 69,31
- Kalimantan Timur: 68,46
- Sumatera Barat: 68,46
- Sulawesi Selatan: 68,20
- Jambi: 68,10

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi dengan minat baca tertinggi nomor satu di Indonesia pada tahun 2023 karena berhasil memperoleh poin hingga 73,27 dalam indikator TGM.

Menyikapi hal tersebut anggota DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas menyampaikan bahwa rendahnya Indeks Kegemaran Membaca di Jawa Timur patut menjadi kewaspadaan bersama, mengingat Jawa Timur sebagai pemilik jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia.

"Bisa dikatakan potretnya Indonesia bisa dilihat dari potretnya Jawa Timur, rendahnya indeks kegemaran membaca dikalangan masyarakat ini harus menjadi point penting bagi Pemprov untuk melakukan trobosan-trobosan baru agar kegemaran membaca masyarakat Jatim meningkat", ujar Anggota dewan dari dapil Malang Raya ini.

"Disamping itu Perpustakaan-perpustakaan yang berada dibawah naungan Provinsi ataupun kabupaten/kota sudah selazimnya melakukan transformasi seiring dengan kemajuan zaman yang terjadi hari ini, proses digitalisasi dan tata ruang perpustakaan yang lebih adaptif bagi generasi Zilenial dan alpha perlu dipertimbangkan supaya menarik minat mereka untuk datang", tambah pria yang juga menjabat sebagai sekretaris Fraksi PKS ini.

## Komisi E DPRD Jawa Timur Soroti Penahanan Ijazah Siswa yang Terjadi di MTsN 3 Malang

**A**boutMalang.com – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyoroti polemik penahanan ijazah siswa di MTsN 3 Malang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kasus ini saat ini masih dalam tahap pemanggilan saksi-saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas menegaskan bahwa penahanan ijazah tidak seharusnya terjadi. Ia menyebut bahwa sekolah negeri sudah mendapatkan pendanaan dari pemerintah, baik melalui dana BOS maupun BPOPP, untuk mengatasi berbagai kebutuhan operasional.

"Saya pikir harus diklarifikasi terkait penahanan ijasah, gak perlu ditahan karena sudah diberi oleh pemerintah," ujarnya.

Adapun beberapa komponen pembiayaan yang dapat dicover dengan dana BPOPP meliputi, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, peningkatan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan kompetisi, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana sekolah, tambahan penghasilan bagi guru dan tenaga kependidikan, kegiatan literasi sekolah, dan penguatan pendidikan karakter.

Puguh berharap agar kasus seperti ini tidak lagi terjadi, meskipun persoalan ini berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Malang. Ia meminta agar semua pihak menyikapi masalah ini secara bijak.

Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kepala MTsN 3 Malang, Drs. Hj. Warsi, M.Pd., tidak memberikan respons terkait kasus ini.

Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Malang, Ipda Transtoto, menyatakan bahwa saat ini proses masih beradapada tahap pengumpulan keterangan dari saksi-saksi.

"Saya mohon waktu untuk pengecekan lebih lanjut karena saat ini saya sedang ada kegiatan di Bawaslu," ungkapnya.



# HARISANDI SAVARI

Bendahara Fraksi PKS Jatim, Anggota DPRD Jatim dari Dapil 14 (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep), Anggota Komisi D dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur.

Lahir di Sumenep, 23 November 1983, menikah.

## PENDIDIKAN

- SDN Pangarangan V
- SMPN 1 SUMENEP
- SMAN 1 SUMENEP
- S1 Universitas Brawijaya
- S1 Universitas Doktor Nugroho Magetan

## AKTIVITAS

- Bendahara Fraksi PKS DPRD Prov Jatim
- CEO CHARIS GROUP
- Ketua Umum KADIN Pamekasan
- Dewan Pertimbangan PGMNI Jawa Timur
- Dewan Pertimbangan HIPMI Kab Pamekasan



harisandisavari



HarisandiSavari

## Anggota FPKS Jatim Haris Savari Minta Ada Proteksi Warung Kelontong Madura di Jakarta

**K**eberadaan warung kelontong Madura tidak asing lagi. Maklum, hampir di setiap lingkungan permukiman penduduk terdapat warung Madura. Warung tersebut muncul 10 tahun lalu di Jabodetabek.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Harisandi Savari, mengatakan, perlu adanya perlindungan khusus terhadap kesejahteraan pengusaha Madura. Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur yang ada di Jakarta, perlu melakukan pendampingan soal keamanan dan keberlanjutan warung Madura ini.

“Teman teman Madura yang buka warung kelontong merupakan bagian penting dari UMKM. Negara kuat karena adanya UMKM ini,” kata Haris saat rapat Kerja Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jawa Timur di kantor Badan Penghubung Jawa Timur di Jakarta.



Anggota DPRD Fraksi PKS ini menambahkan, UMKM tercatat menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 62 persen, atau sekitar 8.500 triliun, jauh jika dibandingkan perusahaan manufaktur skala besar yang ada di jalan sudirman yang punya puluhan bahkan ratusan ribu karyawan.

“Dari Produk Domestic Bruto (PDB) kenyataannya begitu. Sungguh sangat besar. Sangat naif jika pelaku UMKM di sini dibiarkan tanpa adanya rasa aman,” tandasnya.

Tiga tahun belakangan ini persebaran warung Madura yang penjualnya semua berasal dari Madura, sehingga dinamakan warung Madura, menjamur sangat pesat. Bahkan keberadaannya kini ada yang hanya berjarak 30 meter antara warung Madura satu dengan lainnya.

Sementara, Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Zainal Fanani, mengaku terus melakukan komunikasi dengan ketua paguyuban yang menaungi Warung Kelontong Madura.

“Tidak secara spesifik tentu. Tapi kami terus melakukan komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Karena ini juga salah satu tugas kami,” pungkasnya.}}

# Anggota FPKS DPRD Jatim ini Minta Pemprov Perbaiki Infrastruktur di Madura, untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat



Madura itu infrastruktur jalannya harus diperbaiki, agar masyarakat yang ingin melakukan pekerjaan maupun ingin berbisnis, bisa lebih lancar, lebih leluasa, lebih nyaman dan aman. Transportasi massal sangat dibutuhkan disana,”

Anggota DPRD provinsi Jatim dari Fraksi PKS Harisandi Savari meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Madura. Karenanya, infrastruktur dan transportasi publik harus dibenahi.

Menurut anggota komisi D DPRD provinsi Jatim ini, pilot-pilot project yang digagas oleh Pemprov Jatim bersama Dinas Perhubungan ini, salah satunya adalah bus TransMadura.

Masyarakat Madura sudah tidak sabar ingin menikmati perjalanan dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain di Madura. Karena selama ini sarana transportasi yang ada sebagian besar sudah tidak layak, dan tidak aman.

“Madura itu infrastruktur jalannya harus diperbaiki, agar masyarakat yang ingin melakukan pekerjaan maupun ingin berbisnis, bisa lebih lancar, lebih leluasa, lebih nyaman dan aman. Transportasi massal sangat dibutuhkan disana,” tukas anggota DPRD Jatim dari dapil 14 yang mencakup seluruh kabupaten di Pulau Madura ini.

Harisandi juga menceritakan bahwa selain

fasilitas infrastruktur jalan, dibutuhkan juga terminal-terminal yang memadai. Karena di terminal tersebut, masyarakat setempat bisa membuka lapak untuk berjualan.

Selain transportasi massal bus TransMadura, terminal yang bagus dan memadai, juga bandara.

“Pembangunan infrastruktur bandara sangat dibutuhkan. Bandara bisa mempermudah dan mempercepat mobilitas masyarakat antar pulau. Dari Sumenep ke Jakarta, Ke Malang, atau ke tempat lainnya,” sambungnya.

Harisandi mengakui, untuk mendapatkan semua itu sebenarnya tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura, meningkatkan IPM masyarakat Madura dan juga mengenalkan pulau Madura secara global.

Harisandi juga menyebutkan bahwa pelabuhan Jangkar yang ada di Madura ini sangat efektif, efisien juga, terutama jalur dari pelabuhan ke pulau lain dimana di tempat tersebut memiliki kekayaan alam yang bisa dijual.

Dan masyarakat setempat juga membutuhkan barang atau produk dari pulau lain. Transaksi ini yang membuat sektor perdagangan menjadi sangat vital.

“Mudah-mudahan dengan adanya kapal dari pelabuhan Jangkar ini bisa memaksimalkan perekonomian di Madura. Saya rasa akses transportasi dari darat, laut dan udara, bisa membuat Madura lebih dikenal, lebih makmur dan lebih cerdas masyarakatnya,” harapnya.

Harisandi menambahkan, sekarang dari Bangkalan sampai Sampang ini sudah ada pelebaran jalan, itu yang pertama.

“Yang kedua saya juga mengusulkan bagaimana perbaikan infrastruktur jalan ini bisa menumbuhkan kembangkan perekonomian agar bisa terus meningkat keadaannya. Dengan fasilitas angkutan transportasi massal yang nyaman dan aman, tentu akan mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas, termasuk di sektor pendidikan, pertanian, perdagangan, perikanan dan juga masyarakat Madura tidak perlu mencari nafkah kemana-mana,” pungkasnya.}}

## Kapal Layar Motor Lorena dari Sumenep Karam, Anggota FPKS Jatim Harisandi Savari Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Tenggelamnya Kapal Layar Motor (KLM) Fajar Lorena yang membawa penumpang dari Sumenep Madura, Minggu (8/12/24). Menjadi perhatian tersendiri bagi Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS Harisandi Savari.

Kapal Fajar Lorena Safari yang mengangkut 73 orang itu tenggelam di Selat Madura, saat perjalanan dari Pelabuhan Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, menuju Pelabuhan Kalbut, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kapal ini mengalami kebocoran di tengah jalan.

Sampai saat ini, dua korban dikabarkan meninggal, 1 hilang. Sementara 70 orang lainnya telah diselamatkan Kapal Tanker MT Berlian Selatan yang sedang melintas.

Harisandi Savari, Anggota DPRD Jatim dari dapil 14 yang meliputi seluruh kabupaten di Pulau Madura ini meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada kasus ini.

Menurutnya, pengawasan sangat berperan penting, sehingga semua kapal dari keberangkatan hingga tujuan keselamatannya bisa terjaga, sebagai upaya memperkecil kecelakaan.

Selain itu, ia menyampaaikan perlunya sosialisasi tentang pentingnya keselamatan transportasi antar pulau, juga dibutuhkan adanya pengawasan yang ketat soal keberangkatan transportasi baik sisi kapasitas serta kelayakan.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dishub Jatim agar seluruh korban selamat bisa ditampung sementara dan diberikan kebutuhan makan minum yang layak," ujar pria kelahiran 1983 ini.

Untuk saat ini Haris mengaku akan terus melakukan pemantauan terhadap para korban selamat. Ia juga meminta Dishub Jawa Timur untuk menganalisis penyebab tenggelamnya KLM Fajar Lorena ini.}





# KHUSNUL KHULUK

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 5 yang meliputi Kabupaten Jember, Lumajang.

Lahir di Lumajang, 9 September 1964, menikah

## PENDIDIKAN

- SMAN 1 Lumajang
- S1 di iKIP Malang

## AKTIVITAS

Anggota Fraksi PKS DPRD Prov Jatim



khusnulkhuluk64

## Rawan Impor di Program Makan Bergizi Gratis, Khusnul Khuluk Minta Pemerintah Proteksi Petani dan Peternak

**P**rogram Makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan pemerintah membuat anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Khusnul Khuluk khawatir atas nasib petani dan peternak. Karena program itu berpotensi membuka keran impor yang mengakibatkan petani dan nelayan gulung tikar.

"Jika tikarnya sudah digulung ya sulit bangkit," katanya.



Menurutnya, gulung tikarnya petani dan peternak akan terjadi jika stok yang dibutuhkan untuk memenuhi Program Makan Bergizi Gratis ini secara nasional habis. Sehingga diperlukan impor untuk menjalankan program ini.

"Diprediksi oleh sebagian besar para praktisi dan ahli, kemungkinan stok yang dimiliki, hanya mampu bertahan 4 sampai 5 bulan, setelah itu habis. Jika habis kemungkinan besarnya, akan impor. Petani dan peternak kita makin tidak berdaya," tegasnya.

Karena ada kata "bergizi", ujarnya, program yang akan dijalankan pemerintah tahun 2025 ini tentu membutuhkan berbagai komponen seperti daging, susu, telur dan sebagainya.

Karenanya, Khusnul meminta pemerintah memproteksi petani dan nelayan yang terancam dengan dimulainya program pemerintah pusat itu.

Yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menurutnya adalah menguatkan swasembada pangan. Meski demikian, menurutnya, akan tetap sulit jika keran impor dibuka oleh pemerintah pusat.

"Ini kaitannya dengan pemerintah pusat, kalau hanya provinsi saja serius, sementara keran impor dilepas, sama saja," ujarnya.

Khusnul juga berharap, pemerintah banyak menggelar pelatihan-pelatihan untuk ketrampilan, juga penguatan modal untuk UMKM yang sangat diperlukan oleh masyarakat saat keran impor mulai dibuka.

Karena menurutnya, dampak pemerintah melakukan impor besar-besaran ini menghimpit para petani dan peternak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus punya tindakan antisipatif untuk menyelamatkan masyarakat, khususnya petani dan peternak.

Ini kaitannya dengan pemerintah pusat, kalau hanya provinsi saja serius, sementara keran impor dilepas, sama saja,"



## Pengeroyokan Warga Jember di Sidoarjo oleh Anggota Perguruan Silat, Anggota FPKS Jatim Khusnul Khuluk Minta Pemerintah Tak Hanya Bongkar Tugu

**P**engeroyokan warga oleh anggota perguruan silat terjadi lagi. Kali ini di Sidoarjo, Jumat dini hari (5/12/2024). Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS meminta pemerintah serius menangani kejadian ini.

Khusnul mengaku mendapatkan video yang dikirim langsung oleh pria bernama Lery HP, yang merupakan sepupu korban pengeroyokan. Lery ini, Khusnul menjelaskan merupakan sepupu korban, yang juga caleg PKS di Kabupaten Jember.

Dalam video itu Lery menjelaskan bahwa adiknya yang bernama Akma mengalami korban luka sayatan di bagian paha dan menerima banyak pukulan sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit di Sidoarjo.

Dalam video itu, Lery meminta warga Sidoarjo untuk saling menjaga warganya. Ia juga meminta Polres Sidoarjo dan jajarannya, juga Bupati untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.

Khusnul yang menerima video ini langsung memberikan responnya. Menurutnya, kejadian pengeroyokan oleh anggota perguruan silat ini tidak terjadi sekali dua kali, namun berulang kali.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari dapil V (Kabupaten Lumajang dan Jember) ini meminta pemerintah dalam hal ini Kepolisian dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim meningkatkan keamanan dan pembinaan kepada para pemuda.

“Jangan hanya membongkar tugu-tugu persilatan di berbagai daerah, namun juga harus dibarengi dengan penyuluhan kepada mereka,” tegasnya.

Selama ini, ia menilai, berbagai pembinaan dan penyuluhan kepada pemuda dinilai kurang mengena. Jika penyuluhannya dikemas dengan cara lebih menarik yang sesuai dengan kebutuhan gen Z, menurutnya akan lebih diperhatikan.

“Mungkin sosialisasinya selama ini formal banget, satu arah dengan bahasa orang tua, bukan remaja. Kostum polisi saat sosialisasi mungkin juga bisa membuat gap. Atau bisa jadi tempat tempat sosialisasinya yang kurang asyik. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” katanya.

Khusnul kemudian juga mengusulkan ada even atau pertandingan persahabatan antar perguruan pencak silat misalkan, yang bisa menyalurkan potensi anggota perguruan silat secara sporttif dan terkendali.

“Yang jelas kejadian ini harus diusut, pelakunya ditangkap dan diberikan efek jera,” pungkas anggota DPRD Jatim yang bertugas di komisi B itu.}

Jangan hanya membongkar tugu-tugu persilatan di berbagai daerah, namun juga harus dibarengi dengan berbagai pembinaan dan penyuluhan kepada mereka,”

## Anggota FPKS Jawa Timur Jatim Khusnul Khuluk Optimis Jawa Timur Bisa Swasembada Gula di 2025

**A**nggota Fraksi PKS di DPRD Provinsi Jawa Timur Khusnul Khuluk menyebut, tahun 2025 mendatang, Jatim bisa swasembada gula. Meski demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Pria yang saat ini bertugas di komisi B di DPRD Provinsi Jawa Timur ini optimis target Swasembada gula tahun 2025 bisa tercapai asalkan ada beberapa syarat yang bisa dipenuhi.

Pertama, harus ada komitmen dari pemerintah pusat untuk menghentikan impor gula. Karena jika impor gula dilakukan, petani tidak akan mampu bersaing harga. Jika diteruskan, petani akan merugi, dan terancam gulung tikar.

Kedua, Pemprov Jawa Timur harus mensupport dan mendorong partisipasi petani muda dalam budidaya tebu melalui Dinas Perkebunan. "Dari sisi sinergi, gula nasional harus meningkatkan layanan ke petani termasuk bagaimana rendaman tebu bisa terus meningkat," katanya.

Menurut Khusnul, selama musim kemarau tahun 2024, produksi tebu di Jawa Timur diprediksi lebih tinggi dari tahun 2023 yakni mencapai 1, 127 juta ton. Sementara, ia menjelaskan, stok gula kristal putih di Jatim pertanggal 15 Oktober 2024 sebanyak 669. 224 ton. Rinciannya, stok petani sebanyak 59. 821 ton, pabrik sebanyak 133. 095 ton dan PTPN sebanyak 32. 442 ton.

Dengan melihat data tersebut, menurut Khusnul, Jawa Timur bisa menjadi Barometer industri gula nasional. Sebab sekarang ini, katanya, luas tanaman tebu di Jatim seluas 229. 000 hektar. Khusnul juga mengatakan bahwa produksi gula Provinsi Jawa Timur rata-rata 5 tahun terakhir sebanyak 1, 2 juta ton per tahun, sedangkan produksi gula nasional 2, 2 juta ton.

"Artinya kurang lebih 50% Jawa Timur sudah memberikan kontribusi untuk kebutuhan gula nasional," pungkasnya.}}



# AGUS CAHYONO

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 9 yang meliputi Trenggalek-Ponorogo-Pacitan-Magetan-Ngawi).

Lahir di Bojonegoro, 6 November 1973, menikah

## PENDIDIKAN

- SDN Kadewan 1
- SMPN 1 Kasiman
- SMAN 1 Trenggalek
- S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Sunangiri Bojonegoro
- S2 di Universitas Darul Ulum Jombang

## AKTIVITAS

- Anggota Fraksi PKS DPRD Prov Jatim
- Pembina Yayasan Mutiara Ummat Durenan Trenggalek

 aguscahyono\_trenggalek

 Agus Cahyono

**Jaði Nara  
Sumber  
ði Rapat  
Sosialisasi  
dengan  
Kelompok  
Tani Hutan  
Pacitan dan  
Ponorogo,  
Anggota  
DPRD  
Jatim  
Agus Cah  
Siap Beri  
Advokasi**

**A**nggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS Agus Cahyono terus melakukan sosialisasi fungsi anggota legislatif kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus paham sehingga dewan juga bisa melakukan advokasi untuk masyarakat.

Hal ini disampaikan Agus Cahyono saat menjadi nara sumber dalam Rapat Sosialisasi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan wilayah Bakorwil 1 Madiun, Kamis (14/11/2024) di SMK Negeri 1 Slawung Madiun.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh 261 kelompok tani hutan dari wilayah Pacitan dan 99 dari Ponorogo itu, Agus menyampaikan 3 tugas pokok dan fungsi dari anggota DPRD, yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.



Jika ada permasalahan terkait dengan 3 fungsi itu yang terkait dengan permasalahan kelompok tani hutan, saya siap menerima aspirasi, siap mengadvokasi,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ini.

“Anggota dewan, punya hak anggaran yang bisa diajukan ke pemerintah. Jadi ini bisa dimanfaatkan,”

Misalnya, jika kelompok tani hutan membutuhkan backup regulasi apabila belum ada regulasi yang menaungi hal terkait dengan kelompok tani hutan, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini siap memasukkan menjadi program legislasi.

“Misalnya ada yang tanya tentang sumber air yang mengering, monggo bisa disampaikan aspirasinya ke DPRD dan menanyakan tentang Perda tentang perlindungan mata air misalnya. Di beberapa daerah sudah ada Perda itu, misalnya larangan menanam pohon di sekitar sumber mata air, dan lain-lain” katanya.

Aspirasi tentang problematika pertanian bisa juga disampaikan, misalnya berhubungan dengan permasalahan pertanian, seperti bantuan bibit dari pemerintah, problem pupuk dan sebagainya.

“Anggota dewan, punya hak anggaran yang bisa diajukan ke pemerintah. Jadi ini bisa dimanfaatkan,” katanya.

Menurutnya, sosialisasi dengan petani hutan yang dilakukan, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain sosialisasi fungsi dewan, Agus Cah menyampaikan, juga ada sosialisasi tentang bagaimana membuat program, pendampingan penyuluh dari dinas kehutanan provinsi dalam produksi pertanian hingga pemasaran, bagaimana tata kelola keuangan kelompok, bagaimana mengelola koperasi.

“Bismillah, semoga petani hutan kita makin berdaya, makin sejahtera,” harap Agus. {}



## Berkunjung ke Bakorwil III Malang, Anggota Fraksi PKS Agus Cah Minta Maksimalkan Peran

**D**alam kunjungan ke Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III di Malang, pada Jumat (1/11), Anggota Fraksi PKS Agus Cahyono berharap Bakorwil III bisa terus memaksimalkan perannya.

Hal ini disampaikan pria yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur ini saat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan rapat kerja di Bakowil III Malang.

Menurut Agus, kunjungan Bampeperda DPRD Jatim dirasa perlu, dalam rangka mengevaluasi berbagai peraturan daerah yang ada.

“Salah satu tugas Bapemperda yaitu memaksimalkan dan mengevaluasi perda-perda yang ada. Jika ada yang sudah tidak relevan, akan kami evaluasi,” kata pria asli Trenggalek itu.



Di antaranya permasalahan yang pernah terjadi saat kegiatan Bromo Run di mana ada beberapa permasalahan antar komunitas, stakeholder, kemudian penyandang anggaran kegiatan jadi permasalahan,”

Bakorwil III Malang, ia menjelaskan membawahi beberapa daerah, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Bakorwil bertugas dalam koordinasi dan pengembangan wilayah di daerah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Agus mengapresiasi kinerja Bakorwil III Malang yang dinilai berhasil mengordinir beberapa wilayah dengan baik.

“Alhamdulillah Bakerwil III ini termasuk yang bagus,” katanya.

Bakorwil, menurutnya juga dinilai bisa menyelesaikan berbagai permasalahan lintas kabupaten di wilayah kerja Bakorwil 3.

“Di antaranya permasalahan yang pernah terjadi saat kegiatan Bromo Run di mana ada beberapa permasalahan antar komunitas, stakeholder, kemudian penyandang anggaran kegiatan jadi permasalahan,” jelasnya.

Menurutnya, Bakorwil III Malang juga terlibat turun aktif mengkoordinir, sehingga masalah itu bisa terselesaikan.

“Termasuk permasalahan rebutan pendapatan retribusi di daerah itu, karena kegiatannya ada di wilayah wisata. Bakorwil III juga hadir menyelesaikan masalah itu,” katanya.

Meski demikian, Agus tetap meminta Bakorwil III Malang terus memaksimalkan kinerjanya.

“Harapan kami Bakorwil III ini terus bisa memaksimalkan peran agar pembangunan di Jawa Timur bisa efektif dan efisien,” harapnya. {}

# FRAKSI PKS JATIM



Follow us



[www.fraksipksjatim.id](http://www.fraksipksjatim.id)



[fraksipksjatim](#)